

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan yang signifikan terjadi usai dicetuskannya tiga paket undang-undang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Lahirnya UU paket keuangan negara ini menjadi tonggak reformasi akuntansi pemerintahan karena menjadi cikal bakal dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengubah pelaksanaan akuntansi pemerintah dari mulanya berbasis kas menjadi berbasis kas menuju akrual (CTA) hingga kemudian disempurnakan kembali menjadi berbasis akrual melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan akuntansi pemerintah berbasis akrual selambat-lambatnya dilakukan untuk laporan keuangan TA 2015. Menurut Atmojo (2018), Akuntansi berbasis akrual adalah wujud pelaksanaan akuntansi menggunakan dasar waktu terjadinya transaksi, tanpa mempertimbangkan waktu kas atau setara kas

dikeluarkan atau diterima. Hal tersebut membuat laporan keuangan basis akrual dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik dibanding basis Cash Towards Accrual (CTA)/kas menuju akrual. Sehingga akan mewujudkan prinsip akuntansi *full disclosure* atau pengungkapan secara lengkap.

Sebagai instansi pemerintah, KPPN Jakarta IV memiliki kewajiban untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam laporan keuangannya. Terdapat tujuh (7) jenis laporan keuangan yang harus disusun KPPN Jakarta IV setiap tahunnya, salah satu diantaranya ialah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA bertujuan untuk memberikan informasi berupa realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan suatu entitas yang kemudian realisasi tiap-tiap pos keuangan tersebut akan diperbandingkan dengan anggaran yang sebelumnya direncanakan. Informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi keputusan terkait pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan terhadap anggaran (PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran).

Salah satu komponen yang wajib dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah belanja. Menurut PSAP 02, belanja merupakan seluruh pengeluaran dari RKUN/D yang mengurangi ekuitas dana lancar pada periode anggaran berkenaan namun tidak diperoleh pembayarannya kembali. Berdasarkan PP No 24 Tahun 2005, klasifikasi jenis belanja menurut ekonomi untuk Pemerintah Pusat meliputi belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial), belanja modal, dan belanja lain-lain. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat yang memberi

manfaat jangka pendek. Belanja tersebut kemudian dicatat dan dituangkan pada Laporan Realisasi Belanja sebagai bentuk pertanggungjawaban satker atas penggunaan anggaran belanja.

Selain LRA, salah satu komponen wajib dalam laporan keuangan yang harus disusun oleh KPPN Jakarta IV sebagai entitas pelaporan adalah Laporan Operasional (LO). LO berisikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan suatu entitas pelaporan yang terdiri dari pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-operasional yang kemudian akan diperbandingkan dengan realisasi tiap-tiap pos keuangan tersebut pada periode sebelumnya. Laporan ini dibutuhkan sebagai bahan evaluasi pendapatan-LO dan beban dalam rangka menjalankan entitas pemerintahan (PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional).

Salah satu komponen yang terdapat dalam Laporan Operasional (LO) adalah akun beban. Menurut PSAP 12, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Terdapat tiga kondisi untuk mengakui beban, yaitu pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengklasifikasian beban dilakukan menurut ekonomi yang tercerminkan dalam beberapa beban berikut, yaitu beban pegawai, beban persediaan, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban lain-lain, beban penyisihan piutang, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset tetap tak berwujud, dan beban transfer.

Berdasarkan informasi dalam pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004, yaitu *“tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan,”* KPPN Jakarta IV sebagai unit eselon III di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan wajib menyelenggarakan kebijakan akuntansi dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada suatu entitas pelaporan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Juwita, 2013). Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan atas penerapan akuntansi belanja dan beban operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV. Dalam hal ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu hanya pada tahun anggaran 2020. Penulis menuangkannya dalam karya tulis tugas akhir dengan judul **“TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN OPERASIONAL PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah yang akan diangkat diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi belanja dan beban operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV.
2. Bagaimana pengakuan belanja dan beban operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV.

3. Bagaimana pengukuran belanja dan beban operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV.
4. Bagaimana penyajian dan pengungkapan belanja dan beban operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengklasifikasian belanja dan beban operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV.
2. Mengetahui bagaimana pengakuan belanja dan beban operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV.
3. Mengetahui bagaimana pengukuran belanja dan beban operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV.
4. Mengetahui bagaimana penyajian dan pengungkapan belanja dan beban operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Fokus lingkup pembahasan dalam karya tulis ini terletak pada peninjauan atas penerapan akuntansi belanja dan beban operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV, khususnya dalam hal pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, hingga penyajian data pada laporan keuangan satker tahun 2020. Untuk mendukung serta membatasi ruang lingkup penelitian ini, penulis akan berpedoman pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, PMK, serta peraturan lain yang mengatur tentang penerapan akuntansi belanja dan beban yang berlaku sampai

saat ini. Adapun objek dalam penelitian ini terbatas pada lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat akademis**

Penulis berharap agar penulisan karya tulis ini dapat meningkatkan wawasan pembaca mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, khususnya dalam hal akuntansi belanja dan beban operasional pada satker pemerintah. Selain itu, penulis juga berharap agar karya tulis ini dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan akademisi sehingga dapat disempurnakan di kemudian hari.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi masyarakat, penulis berharap agar penulisan karya ilmiah ini dapat menjadi media informasi publik untuk lebih mengenal penerapan Standar Akuntansi Pemerintah serta dalam rangka mendukung perwujudan transparansi atau keterbukaan pemerintah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Bagi objek KTTA (KPPN Jakarta IV), penulis berharap agar penulisan karya ilmiah ini dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi satker terkait dalam menyusun laporan keuangannya serta meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan belanja operasional satker.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menyajikan gambaran umum mengenai topik karya tulis. Gambaran umum tersebut tercerminkan dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. Penulisan latar belakang berguna untuk memberikan resume/garis besar terkait apa yang akan dibahas pada karya tulis ini. Rumusan masalah untuk menguraikan pokok permasalahan yang akan dikaji. Tujuan penelitian adalah hasil akhir yang ingin penulis dapatkan dalam penyusunan karya tulis.

Selain itu, terdapat juga ruang lingkup pembahasan yang isinya mengenai batasan-batasan lingkup dalam penyusunan karya tulis ini agar tetap sesuai koridor yang telah ditetapkan di awal. Manfaat penulisan ditujukan untuk para stakeholder yang terlibat dalam penyusunan karya tulis ini. Terakhir, sistematika penulisan untuk memberikan informasi dengan jelas dan tepat terkait isi dari karya tulis.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini diuraikan berbagai tinjauan pustaka yang menjadi landasarn dan pedoman penulis dalam menyusun karya tulis tugas akhir. Penulis menjabarkan mengenai definisi dan klasifikasi belanja dan beban operasional, prinsip pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapannya.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini disajikan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, gambaran umum mengenai objek karya tulis penulis, serta pembahasan hasil mengenai tinjauan atas pelaksanaan akuntansi belanja dan beban operasional

pada objek dimaksud. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara, studi dokumentasi, serta observasi. Gambaran umum objek berisikan informasi terkait profil (sejarah singkat), struktur organisasi, visi dan misi, tupoksi dari, serta sekilas mengenai penerapan akuntansi belanja dan beban operasional pada objek. Pada sub bab pembahasan disajikan berbagai temuan atas tinjauan yang telah dilakukan terkait definisi dan klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan belanja dan beban operasional pada objek.

#### **BAB IV SIMPULAN**

Pada bab ini diuraikan simpulan atas hasil tinjauan terhadap penerapan akuntansi belanja dan beban operasional pada objek.